

KAJIAN WANITA

LAPORAN PENELITIAN

PERANAN WANITA DALAM KEHIDUPAN POLITIK
NASIONAL KASUS DKI JAKARTA



Oleh :
Supriadi
Kholik

Dibiayai Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
No : 072/LIT/BPPK-SDM/IV/2002 Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS SAHID
JAKARTA
2002

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

- 1.a. Judul Penelitian : Peranan Wanita Dalam Kehidupan politik NasionaI Kasus DKI Jakarta.
- b. Kategori Penelitian : Kajian Wanita
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Supriadi, Drs, MSi
- b. Bidang Keahlian : Komunikasi
- c. Jabatan Saat ini : Pembantu Dekan II
- d. Alamat : Gedung Universitas Sahid (Lt. 6)
Jl. Prof.DR.Supomo, SH. No.84, Jakarta Selatan
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 (satu) orang
4. Lokasi Penelitian : DKI Jakarta
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya yang Diperlukan : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

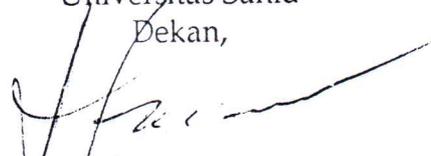
Jakarta, Oktober 2002

Ketua Peneliti



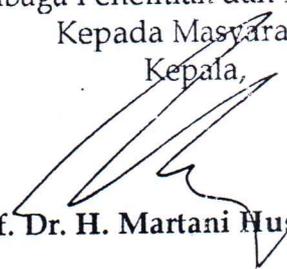
Supriadi, Drs, MSi

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Sahid
Dekan,



Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA

Menyetujui,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Kepala,



Prof. Dr. H. Martani Huseini, MBA

PERANAN WANITA DALAM KEHIDUPAN POLITIK NASIONAL (KASUS DKI JAKARTA)

Oleh
Supriadi
Kholil

RINGKASAN

Sepanjang zaman pembicaraan tentang peranan wanita dalam kehidupan sosial selalu aktual untuk dijadikan topik pembicaraan. Demikian juga di Indonesia sering menjadi polemik tentang peranan wanita dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan tugas rangkap wanita, yaitu sebagai wanita karir dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

Polemik tersebut sempat mencuat begitu kuat ketika pemimpin suatu partai politik (PDIP) mempunyai kesempatan yang cukup besar untuk menjadi presiden, karena partai yang dipimpinnya meraih suara terbanyak dalam Pemilu 1999. Karena berbagai kepentingan dan polemik kelompok-kelompok dalam masyarakat, akhirnya

Abdurachman Wahid (GusDur) maju dan naik menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi banyaklah asosiasi-asosiasi (LSM) yang bergerak memperjuangkan kepentingan kaum wanita dan mendorong kaum wanita agar berkiprah dalam berbagai bidang terutama di arena politik dengan cara menjadi anggota berbagai kelompok/lembaga, terutama lembaga-lembaga politik mulai partai politik sampai Dewan Perwakilan Rakyat.

Partisipasi politik, termasuk partisipasi politik wanita ditentukan oleh tingkat pendidikan, ekonomi, dan nilai-nilai sosial budaya yang dianut. Di negara-negara maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa Barat tingkat partisipasi politik kaum wanita cukup tinggi dibandingkan dengan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi kaum wanita dalam politik dengan melihat secara kuantitas keanggotaan wanita di lembaga-lembaga politik kasus DKI Jakarta, seperti DPR, DPRD, DPP dan DPD lima partai politik terbesar hasil Pemilu 1999.

Hasil peneltiian menunjukkan :

1. Secara kuantitas representasi kaum wanita di lembaga-lembaga politik seperti DPR dan partai politik masih sangat rendah (hanya 14 % untuk tingkat DKI Jakarta dan 5 % untuk tingkat pusat)

2. Dari kelima partai besar (PDIP, GOLKAR, PPP, PKB, dan PAN) baik di tingkat DKI Jakarta maupun tingkat pusat sebagian besar jabatan strategis di pimpinan puncak masih didominasi oleh kaum laki-laki.
3. Meskipun secara kuantitas representasi kaum wanita masih rendah di lembaga-lembaga politik, akan tetapi partisipasi dan aktivitas anggota partai politik dari kaum wanita termasuk tinggi.

THE ROLE OF WOMEN IN NATIONAL POLITICAL LIFE CASE

STUDY IN DKI JAKARTA

By
Supriadi
KHOLIL.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out political participation of women in political institutions case study in DKI Jakarta such as parlement, cabinet, and political party. The result shows that women political participation is quantitatively lower than man, but qualitatively the most of the women high in political participation.

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya keseringan konflik dan pendapat di masyarakat tentang peranan wanita dalam kehidupan sosial politik. Mulai dari kiprah wanita di dunia kerja sampai pada kiprahnya di lembaga-lembaga politik. Masalah tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1999 ketika partai politik yang dipimpin oleh seorang perempuan (PDIP) memperoleh suara terbanyak dalam pemilu pada tahun 1999. Dengan posisi ini Megawati Soekarno Putri mempunyai peluang besar untuk menjadi Presiden RI. Terjadilah polemik di masyarakat tentang boleh tidaknya seorang wanita menjadi Presiden di Indonesia. Penelitian ini berjudul **“Peranan Wanita Dalam Kehidupan Politik Nasional Kasus DKI Jakarta”**. Bagaimana kiprah wanita yang menjadi anggota DPD, DPRD, Kabinet maupun yang ada di partai politik.

Penelitian ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang ada di Sekretariat DPR/MPR, Bapak dan Ibu yang ada di Humas DPR/MPR. Demikian juga kepada Bapak dan Ibu yang ada di Humas DPRD DKI

Jakarta, Bapak dan ibu yang ada di Sekretariat DPP dan DPD Partai Politik yang ada di DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini pula kami Ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberikan kesempatan dalam penelitian ini. Kepada Kepala Lembaga dan rekan-rekan yang ada di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2KM) kami ucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga dapat terselesaikannya penelitian ini, terutama saudara Fathoni yang dengan cekatan membantu pengetikan laporan penelitian ini.

Scperti pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, kami mengharapkan kritikan yang konstruktif bagi laporan penelitian ini, dan mudah-mudahan penelitian ini ada manfaatnya bagi masyarakat, Amiin !

Jakarta, Oktober 2002

Penulis



Supriadi, Drs, MSi

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kontribusi Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Politik	8
2.2. Minat dan Partisipasi Politik	13
2.3. Motivasi dan Partisipasi Politik	16
2.3.1. Teori Tingkat Kebutuhan (<i>Hierarchy of Need Theory</i>)	17
2.3.2. Teori Motif Berprestasi ...	19

BAB III	METODE PENELITIAN	21
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	23
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	31
	A. Kesimpulan	31
	B. Saran	31

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

1. Teori Tingkat Kebutuhan Maslow	18
---	----

DAFTAR TABEL

HALAMAN

1. Perbandingan Jumlah Laki-laki dan Wanita yang Menduduki Jabatan Penting di DPR Pusat	23
2. Perbandingan Jumlah Laki-laki dan Wanita yang Menduduki Jabatan Penting di DPRD DKI Jakarta	24
3. Proporsi Pengurus Laki-laki dan Perempuan di 5 Partai Besar (PDIP, GOLKAR, PPP, PKB dan PAN)	25
4. Perbandingan Pengurus Laki-laki dan Wanita di Partai Politik Tingkat DPD DKI Jakarta	26
5. Komposisi Keanggotaan DPR Pusat Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan, Usia, Daerah Asal dan Agama	27
6. Komposisi Keanggotaan DPRD DKI Jakarta Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan, Usia, Daerah Asal dan Agama	28

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kaum perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu bangsa. Sejarah perkembangan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa dalam setiap perjuangan, baik perjuangan fisik maupun politik, kaum wanita selalu ikut tampil bersama kaum laki-laki. Dilihat dari segi kuantitas kaum wanita Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki. Berdasarkan Jurnal Yayasan Perempuan (1999), jumlah kaum perempuan Indonesia pada tahun 1999 mencapai 55 % dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 200 juta jiwa. Tingginya presentase kaum wanita ini mengindikasikan bahwa kaum wanita sangat potensial dalam proses perkembangan bangsa.

Dalam kaitannya dengan pembangunan, khususnya bidang politik juga diperlukan pemikiran-pemikiran yang berasal dari kaum perempuan sebagai representasi hak-haknya pada tingkat kebijakan. Namun permasalahan yang muncul kemudian, manakala kita memandang perempuan dan pembangunan dari sudut pandang gender. Di satu sisi memberi dampak positif, yaitu dapat memperdalam

pengertian kita tentang penyebab perbedaan dan ketidak samaan antara laki-laki dan perempuan serta membantu strategi baru yang bersifat efektif untuk membantu menanggulangnya. Di sisi lain, kita menemukan masalah yang berasal dari perempuan itu sendiri, hal tersebut merupakan cermin dari proses yang begitu lama. Cara berpikir perempuan atas kepentingan politiknya dibelenggu oleh politik pria. Secara perlahan kesempatan itu mulai terbuka bagi perempuan, tetapi mereka seolah enggan keluar dari belenggu tersebut.

Melihat gejala-gejala yang terjadi seperti yang diuraikan di atas, kita tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada kaum perempuan. Menurut Chusnul Mar'iyah (1999) ada faktor lain yang tidak terlepas dari kenyataan bahwa perempuan merupakan produk sosialisasi budaya patriakal selama ini. Di sinilah kita melihat perspektif gender senantiasa dipertimbangkan konstruksi sosial dan kodifikasi perbedaan antar jenis kelamin (Dalam Idy Subandy, 1998:23a).

Sehingga kemudian muncul bidang studi wanita/kajian wanita yang mengawali lahirnya konsep gender. Pada awalnya istilah gender hanya digunakan dalam konteks studi bahasa, kini telah memperoleh arti yang baru dalam studi akademik tentang perempuan.

Hal lain yang mendorong dilakukan penelitian tentang masalah gender ini adalah kajian kritis komunikasi politik yang berkaitan dengan polemik wanita boleh tidak menjadi presiden, terutama ketika Megawati Scekarnoputri menjadi calon presiden yang cukup kuat untuk menjadi presiden (sekarang menjadi presiden RI yang kelima).

Pada waktu itu ada dua kubu yang bertentangan, yaitu kubu yang menerima presiden seorang perempuan dan kubu kedua yang menolak perempuan menjadi presiden. Kedua kubu mempunyai argumentasi masing-masing.

Dari polemik tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya kiprah kaum perempuan di bidang sosial dari waktu ke waktu semakin meningkat, terbukti semakin banyaknya perempuan yang melibatkan diri dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang bergerak untuk kepentingan perempuan.

Melalui proses sosialisasi dan pengalaman dalam dunia organisasi kemasyarakatan dan ada beberapa diantaranya yang menduduki jabatan politis seperti menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi anggota Partai Politik dan menjadi anggota Kabinet. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mencoba untuk melakukan

penelitian yang berjudul "Peran Kaum Wanita dalam Kehidupan Politik Nasional (Studi Kasus : di DKI Jakarta).

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar uraian dalam latar belakang di atas dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah peran kaum wanita dalam kehidupan politik nasional (kasus DKI Jakarta)

Ada beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Peran. Yang dimaksud dengan peran di sini adalah sejauhmana seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan status/posisi yang dimilikinya.
2. Kehidupan politik nasional yang dimaksud di sini adalah dinamika politik yang berkembang di Negara RI

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui jumlah anggota DPR wanita di DPR Pusat
2. Untuk mengetahui jumlah anggota DPR wanita di DPRD DKI
3. Untuk mengetahui jumlah wanita anggota DPR yang menduduki jabatan

tidak pada kualitas saran itu sendiri. Diantara kelompok anggota DPR yang aktif adalah Hj. Aisyah Amini, SH. (PPP). Dan pada level eksekutif, khususnya di kabinet gotong royong representasi wanita hanya 2 orang, yakni Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Negara Pemberdayaan Wanita.

Eksistensi Menteri Negara Pemberdayaan Wanita diharapkan mampu meningkatkan peran wanita dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut "public". Hal ini sangatlah wajar, karena jumlah kaum wanita lebih banyak dari kaum laki-laki, namun kecilnya prosentase wanita di lembaga legislatif dan organisasi politik menunjukkan indikasi masih jauh dari harapan.

Menurut sebagian besar responden (86,7%) strategi untuk meningkatkan peran wanita dalam politik dan pembanguana nasional harus dimulai reformasi "paradigma" tentang "gender" dari kaum laki-laki itu sendiri dan pengembangan kemampuan SDM wanita "capacity building" melalui berbagai kegiatan yang terprogram, terencana dan terpadu melalui peningkatan SDM ini. Menurut responden, wanita tidak lagi "memarjinalkan" baik dalam "status" maupun "tugas pekerjaan".